

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hubungan Amerika Serikat dengan India mengalami pasang surut pada era perang dingin yang melibatkan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pada waktu itu, hubungan kedua negara tidak begitu harmonis karena India merupakan sekutu dari Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadikan Pakistan sebagai sekutunya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Amerika Serikat merasa dikhianati oleh Pakistan karena kedekatan Pakistan dengan organisasi-organisasi teror untuk menyerang Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Pada tahun 1965 Amerika Serikat memutuskan untuk menjadikan India sebagai sekutunya karena dilihat dari segi ekonomi India lebih kuat dibanding dengan Pakistan dan kedua negara merasa bahwa mereka memiliki keterikatan yang didasari oleh beberapa persamaan antara lain: kedua negara merupakan negara demokrasi, memiliki keinginan untuk memerangi terorisme, keinginan untuk menstabilkan kawasan Asia Selatan dan kedua negara merupakan negara jajahan Inggris.<sup>2</sup>

Dalam hal kepemilikan senjata nuklir, India menjadi satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* tetapi keberadaannya tetap didukung dan disetujui oleh Amerika Serikat. Hal ini membuat beberapa negara iri karena India diperlakukan begitu istimewa oleh

---

<sup>1</sup> David. S. Shou, *U.S. Policy Towards India and Pakistan in the Post-Cold War Era*, Taipei: Sheng-Chih Book Co. Ltd., 2003.h.23

<sup>2</sup> *Ibid.*

Amerika Serikat. Seperti Pakistan misalnya, Pakistan yang sudah lama menginginkan pengakuan dari Amerika Serikat terkait dengan pengembangan program nuklirnya malah tidak disetujui oleh Amerika padahal Pakistan sudah setia menjadi sekutu Amerika Serikat.

*Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* atau perjanjian non-proliferasi nuklir merupakan suatu perjanjian untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Hanya lima negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Kelima negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang juga memiliki hak veto yaitu, Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis dan Rusia. Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dilaksanakan pada tahun 1968 yang diikuti oleh negara Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Pertemuan itu menyepakati bahwa mereka tidak akan menjual senjata nuklir atau memberikan informasi kepada negara-negara non nuklir. Dibawah pengawasan *International Atomic Energy Agency (IAEA)* atau Badan Tenaga Atom Internasional, negara-negara yang memiliki senjata nuklir diawasi dan dibatasi penggunaannya hanya untuk kesejahteraan manusia dan melarang penggunaannya untuk kegiatan militer.<sup>3</sup>

India telah membangun teknologi nuklir sejak tahun 1970-an dan melakukan uji coba untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Mei 1974 di Pokhran yang diberi kode "*Smiling Buddha*". Uji coba tersebut bersifat resmi karena melibatkan para ilmuwan dan insinyur dari *Bhabha Atomic Research Centre (BARC)* yaitu suatu badan resmi riset teknologi atom untuk perdamaian. Kemudian setelah dua puluh empat tahun tidak melakukan uji coba, perdana

---

<sup>3</sup> Leo Novemi, "Senjata Nuklir India," World kbs, 6 November 2007.

menteri India Vajpayee memerintahkan untuk melakukan serangkaian percobaan peledakan atom yang dinamakan “Operasi Shakti”, yaitu Shakti 1 (11 Mei 1998) hingga Shakti 5 (13 Mei 1998), hal tersebut dilakukan karena diprovokasi oleh peluncuran rudal percobaan Ghauri oleh Pakistan tanggal 6 April 1998.<sup>4</sup>

Akibat dari uji coba tersebut India mendapat kecaman dari berbagai negara. Termasuk Amerika Serikat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Clinton. Amerika Serikat turut memberikan sanksi berupa embargo ekonomi kepada India. Uji coba nuklir tersebut dianggap sebagai perlombaan senjata antara India dan Pakistan yang dapat memicu perang di kawasan Asia Selatan. Selain itu, uji coba tersebut bersifat rahasia dan tanpa sepengetahuan anggota tetap dewan keamanan PBB. Maka dari itu banyak negara yang memberikan sanksi kepada India akibat dari tindakan melakukan uji coba nuklir tersebut.

Berkat kemampuan diplomasi dan lobbying pemerintah India, tahun 2001 setelah serangan 9/11 Amerika Serikat mencabut sanksi tersebut karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika Serikat pada saat itu tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika Serikat yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir.<sup>5</sup>

Pembicaraan dan upaya persuasi terus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat – India sehingga pada tanggal 18 Juli 2005 di Washington, melalui

---

<sup>4</sup> R Irawan, “Teknologi Energi Nuklir di India,” Alpensteel, 19 Januari 2008.

<sup>5</sup> Anggraini, Nurlia. “Perubahan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir India (periode 2000-2006)”. Diakses dari <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=132301&lokasi=lokal> pada tanggal 13 September 2012.

pembicaraan awal antara Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Presiden Bush mereka mengumumkan bahwa kedua negara berencana untuk melakukan kerjasama kemitraan strategis untuk masa depan dalam hal pengembangan teknologi nuklir yang kemudian diberi nama *US – Indo 123 Agreement*.<sup>6</sup>

Sementara itu kunjungan Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke India pada Maret 2006 membuat hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Amerika Serikat memperkuat pengakuannya bahwa India merupakan pemain besar di dunia global sehingga Amerika Serikat perlu menjalin hubungan yang lebih erat dengan India melalui pendekatan yang strategis. Kemudian pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan perjanjian nuklir India – Amerika Serikat pada tanggal 2 Maret 2006 di New Delhi yang merupakan kelanjutan dari perjanjian serupa pada 2005 lalu.<sup>7</sup>

Pada tanggal 1 Oktober 2008 tercipta *US - India nuclear deal* yang merupakan kesepakatan final dari kongres Amerika Serikat mengenai penggunaan nuklir untuk tujuan damai antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah India.<sup>8</sup> Dalam kesepakatan tersebut India diminta memisahkan fasilitas nuklir sipil dan militernya dan bersedia untuk senantiasa diperiksa dan diawasi oleh badan pengawas energi atom internasional (*International Atomic Energy Agency, IAEA*), India juga berkomitmen untuk memperkuat keamanan persenjataan nuklirnya, India setuju untuk mencegah penyebaran teknologi pengayaan dan pemrosesan nuklir ke negara-negara lain, India juga mengizinkan perusahaan-

---

<sup>6</sup> PTI, “*India – US Sign 123 Agreement*,” The Times of India, 11 Oktober 2008.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> AFP. “*India is Energized by Nuclear Deal*,” AFP, 1 Oktober 2008.

perusahaan Amerika Serikat untuk membangun reaktor nuklir di India dan menyediakan bahan bakar nuklir untuk program energi sipil baik dalam hal transfer teknologi dan *technical support*.<sup>9</sup> Kebijakan ini juga akan memungkinkan India bekerja sama dengan negara lain yang merupakan negara-negara penyuplai nuklir seperti Kanada, Australia, Perancis maupun Russia.<sup>10</sup>

Kesepakatan kerjasama nuklir Amerika Serikat dengan India tersebut telah diratifikasi oleh Kongres Amerika Serikat dan disetujui untuk masuk ke dalam Undang-Undang Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melakukan kesepakatan kerjasama nuklir dengan India dikarenakan Presiden George W. Bush sebagai pemerintah eksekutif Amerika Serikat saat itu berasumsi bahwa kesepakatan kerjasama nuklir dengan India akan menguntungkan. Demikian pula menurut Kongres Amerika Serikat selaku pemerintah legislatif berasumsi bahwa kesepakatan kerjasama nuklir dengan India akan menguntungkan pihak Amerika Serikat.<sup>11</sup>

Dalam kesepakatan ini seolah-olah Amerika Serikat memberikan pengecualian kepada negara yang tidak meratifikasi *Nuclear non-proliferation treaty*. Sebagai implikasinya, timbul berbagai perdebatan dari masyarakat internasional. Perdebatan seputar pakta nuklir tersebut dianggap lebih dari sekedar kerjasama nuklir secara teknis tetapi juga tentang munculnya konfigurasi baru dalam keseimbangan global. Disamping itu, muncul kekuasaan dan kebutuhan

---

<sup>9</sup> Esther Pan, Jayshree Bajoria. *The U.S – India Nuclear Deal*. The Washington Post, 4 September 2008.

<sup>10</sup> NR, "India Sign Nuclear Deal With US," News Rediff, 7 Desember 2009.

<sup>11</sup> Ambardini, Riza. "Konsiderasi pemerintah AS dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India (123 Agreement)" Diakses dari [http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/3836841664\\_abs.pdf](http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/3836841664_abs.pdf) pada tanggal: 13 September 2012.

yang lebih luas untuk sebuah tatanan nuklir yang baru di dunia internasional dalam menghadapi tatanan global. Non-proliferasi nuklir tampaknya sudah tidak lagi efektif dalam memenuhi tantangan yang dihadapi masyarakat internasional saat ini.<sup>12</sup>

Penandatanganan perjanjian antara India dan Amerika Serikat memiliki keuntungan bagi kedua negara. Bagi India hal ini dilakukan untuk mendapatkan akses teknologi nuklir yang lebih besar tanpa harus khawatir terhadap tekanan dan ancaman dari Amerika Serikat berupa pemberian sanksi ataupun pemberhentian pengiriman bantuan luar negeri seperti yang terjadi pada Iran dan Korea Utara. Selain itu dengan teknologi nuklir ini, India dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan energinya yang selama ini berasal dari minyak dan gas alam yang diimpor dari Timur Tengah. Sementara itu Amerika Serikat ingin meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih baik dalam bidang keamanan, ekonomi, investasi, perdagangan, pertanian, serta kerjasama teknologi.

Namun, menurut buku yang berjudul *Subordinate Ally: The Nuclear Deal and India – U.S. Strategic Relation* Amerika Serikat mau melakukan kerjasama dengan India dengan alasan akan menguntungkan Amerika Serikat di bidang strategi keamanan dan memperkuat *power* nya di kawasan Asia Selatan untuk mengimbangi pengaruh China yang beraliansi dengan Pakistan sehingga dapat menjaga posisi hegemoninya di dunia internasional. Menurut Amerika Serikat

---

<sup>12</sup> Harst V. Pant. *The U.S. – India Nuclear Deal: The Beginning of a Beautiful Relationship?* King's College London. 2007, h.459.

bekerjasama dengan India merupakan keputusan yang tepat untuk sama-sama menjaga keamanan bagi Amerika dan India.<sup>13</sup>

Untuk mencapai kepentingan suatu negara terhadap negara lain, suatu negara memperkuat powernya di bidang keamanan dengan cara beraliansi dengan negara lain. Aliansi adalah bentuk kerjasama keamanan negara baik formal ataupun informal dengan melibatkan dua atau lebih negara yang berdaulat. Aliansi terbentuk untuk menyeimbangkan ancaman, bukan hanya kekuasaan. Geografi, kemampuan ofensif, dan niat yang dirasakan berkontribusi pada tingkat ancaman. Dalam hal ini Amerika mendukung pengembangan nuklir India dengan cara transfer teknologi, menyediakan bahan bakar uranium dan *technical support*.

Bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India juga sebagai upaya *deterrence* (penangkalan) terhadap nuklir yang dimiliki Pakistan. Dari segi kredibilitas, senjata nuklir digunakan sebagai alat penangkal efektif jika kepemilikan kemampuan yang cukup untuk melakukan pembalasan yang diancamkan. Dan alat penangkal yang efektif harus mengancam dan membuat lawan tidak tertarik untuk melakukan tindakan agresif sehingga senjata nuklir dapat digunakan sebagai kekuatan militer yang efektif dalam segi kekuatan atau force dengan melakukan *deterrence*. Dengan mencegah musuh menyerang atau meyakinkan musuh untuk tidak melakukan perlawanan. Kemampuan balasan sebuah negara berkaitan dengan kemampuan dalam bertahan atau *defensive*. Semakin besar kemampuan dalam bertahan sebuah negara, semakin enggan

---

<sup>13</sup> Prakash Karat. *Subordinate Ally: The Nuclear Deal and India – U.S Strategic Relation*. 2007.h.45.

musuh untuk melakukan serangan, dengan demikian secara fisik mampu membuat musuh untuk berfikir keras atas tindakan untuk melakukan serangan.

Amerika sebagai negara *super power* tidak ingin kekuatannya tergantikan oleh negara manapun. Oleh karena itu, untuk menghimpun dan meningkatkan *power* nya, serta mempertahankan kondisinya di dunia internasional, Amerika Serikat membentuk aliansi dengan India karena Amerika Serikat tidak menghendaki kebangkitan China sebagai *new emerging power* yang muncul sebagai hegemon tunggal di dunia. Hal yang menyebabkan Amerika Serikat beraliansi dengan India karena India telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan militer yang terbilang cukup pesat.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Dukungan pengembangan nuklir India oleh Amerika Serikat penulis menetapkan periode waktu dari tahun 2005 sampai 2009 karena pada masa itu Amerika dan India sering mengadakan pertemuan untuk membicarakan kerjasama energi nuklir. Pada tahun 2005 merupakan pembicaraan awal antara Perdana Menteri India Manmohan Singh dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang mengagendakan bahwa kedua negara sepakat menyetujui kerjasama dalam pengembangan teknologi energi nuklir. Kemudian tahun 2008 tercipta *U.S. – India Nuclear Deal* yang merupakan kesepakatan bilateral mengenai penggunaan nuklir untuk tujuan damai antara pemerintah Amerika dengan India. Sedangkan tahun 2009 merupakan akhir dari kepemimpinan presiden Bush.



Terkait dengan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan India serta dari keseluruhan latar belakang, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu **“Bagaimana Strategi Keamanan Amerika Serikat Dalam Mendukung Pengembangan Nuklir India Periode 2005-2009?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui strategi keamanan dan motif kepentingan nasional Amerika Serikat dalam mendukung program pengembangan nuklir India periode 2005-2009.
2. Untuk menggambarkan hubungan aliansi Amerika Serikat dengan India.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna terhadap disiplin ilmu hubungan internasional, terutama yang berkaitan dengan strategi keamanan Amerika Serikat dalam mendukung pengembangan nuklir India.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Dukungan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap India dalam hal pengembangan teknologi nuklir menimbulkan pertanyaan besar bagi beberapa pihak, hal ini disebabkan karena India merupakan negara yang tidak ikut meratifikasi *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan diplomasi strategi keamanan Amerika Serikat dalam mendukung pengembangan nuklir India dan juga mengenai hubungan aliansi Amerika Serikat dan India.

- **Stephen Walt, *The Origins of Alliances*, 1984 by Cornell University Press.**

Menjelaskan mengenai bentuk-bentuk aliansi dan teori *Balance of threat* sebagai reformulasi dari teori *Balance of power* untuk menjelaskan aliansi antarnegara. Menurut Walt proses pembentukan aliansi tidak terjadi begitu saja, melainkan harus melalui proses dan ditentukan oleh beberapa faktor. Tujuan dibentuknya aliansi adalah untuk menyeimbangkan dan menghadapi ancaman secara bersama-sama. Aliansi terbentuk untuk menyeimbangkan ancaman, bukan hanya kekuasaan. Aliansi didukung oleh faktor distribusi kekuatan dan tingkat ancaman dipengaruhi oleh kedekatan geografis, agregat kekuatan, kekuatan menyerang, dan intensitas penyerangan.

- **Robert Powell, *Nuclear Deterrence Theory: The Search For Credibility, Chapter 2: The Nuclear Evolution and The Problem of Credibility, 1990 by Cambridge University Press.***

Menjelaskan mengenai upaya sebuah negara untuk melakukan pencegahan agar negaranya tidak diserang oleh negara lain dengan cara memiliki senjata nuklir. Senjata nuklir dapat digunakan sebagai kekuatan militer yang efektif dalam segi kekuatan atau *force* dengan melakukan *deterrence* atau penangkalan. Dengan menangkal musuh menyerang atau meyakinkan musuh untuk tidak melakukan perlawanan. Kemampuan balasan sebuah negara berkaitan dengan kemampuan dalam bertahan atau *defensive*. Semakin besar kemampuan dalam bertahan sebuah negara, semakin enggan musuh untuk melakukan serangan, dengan demikian secara fisik mampu membuat musuh untuk berfikir keras atas tindakan untuk melakukan serangan. Daya ledak nuklir yang memiliki kekuatan pemusnah massal membuat negara beramai-ramai membuat teknologi bertenaga nuklir. Sebab, hal itu dapat membuat negara lain berfikir dua kali untuk melakukan serangan karena jika terjadi serangan balasan, efek yang ditimbulkan bisa berakibat fatal.

- **Paul K. Kerr, *U.S. Nuclear Cooperation with India: Issues For Congress, Congressional Research Service, 30 Juli 2008.***

Menjelaskan mengenai hubungan kerjasama nuklir antara Amerika dengan India khususnya kebijakan Amerika terhadap nuklir India. Inti

pokok dari jurnal tersebut adalah Amerika Serikat menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar uranium dan Amerika Serikat juga akan mendukung upaya India untuk mengembangkan strategi cadangan bahan bakar nuklir untuk menghindari gangguan terhadap pasokan masa reaktor India, Amerika Serikat juga akan bergabung dengan India untuk bernegosiasi dengan IAEA mengenai pasokan bahan bakar, jika terjadi gangguan dalam pemasokan bahan bakar ke India, serta Amerika Serikat dan India bersama-sama akan mengadakan pertemuan sekelompok negara pemasok bahan bakar untuk mengembalikan pasokan bahan bakar ke India. Kerr juga mengatakan bahwa pemerintahan Bush telah memikirkan tentang hubungan kerjasamanya dengan India khususnya dibidang energi nuklir sejak 2001. Kemudian kerjasama tersebut berlanjut dalam kemitraan strategis inisiatif untuk memperluas teknologi nuklir. Sampai kemudian membuat kebijakan strategis keamanan AS dalam mendukung pengembangan program nuklir India.

- **Prakash Karat, *Subordinate Ally: The Nuclear Deal and India – U.S. Relation*, Naya Rasta Publishers Pvt. Ltd. September 2007.**

Menjelaskan mengenai implikasi yang terjadi jika Amerika dan India membangun aliansi dibidang strategi keamanan. Pada masa perang dingin, Pakistan dikenal sebagai sekutu dari Amerika untuk melawan kekuatan Uni Soviet karena Pakistan dan Uni Soviet sama-sama berideologi komunis. Namun, setelah perang dingin hampir berakhir,

Amerika merubah aliansi ke India dengan alasan India dapat menguntungkan Amerika dari segi ekonomi dan militer. Amerika mau melakukan kerjasama dengan India dengan alasan akan menguntungkan Amerika Serikat di bidang strategi keamanan dan memperkuat *power* nya sehingga dapat menjaga posisi hegemoninya di dunia internasional. Amerika Serikat beranggapan bahwa bekerjasama dengan India merupakan keputusan yang tepat untuk sama-sama menjaga keamanan bagi Amerika Serikat dan India.

- **Harst V. Pant, *The U.S. – India Nuclear Deal: The Beginning of a Beautiful Relationship?*, King’s College, London, 1 September 2007.**

Menjelaskan mengenai perjanjian nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan India. Dalam perjanjian ini seolah-olah Amerika Serikat memberikan pengecualian kepada negara yang tidak meratifikasi *Nuclear non-proliferation treaty*. Sebagai implikasinya, timbul berbagai perdebatan dari masyarakat internasional. Seperti misalnya China dan Pakistan merupakan negara yang memperdebatkan hubungan kerjasama nuklir yang terjalin antara Amerika Serikat - India. Menurut mereka, Amerika Serikat dapat menjadi contoh yang buruk bagi negara-negara lain karena telah melanggar perjanjian NPT. Selain itu, kesepakatan nuklir Amerika Serikat - India merupakan upaya untuk menjalin kemitraan strategis yang dapat melayani kepentingan kedua negara di tahun-tahun mendatang. Perjanjian

kerjasama nuklir Amerika Serikat - India hanya langkah pertama menuju penataan kembali masa depan kekuatan global. Menurutnya, perdebatan seputar pakta nuklir oleh masyarakat internasional dianggap lebih dari sekedar kerjasama nuklir secara teknis tetapi juga tentang munculnya konfigurasi baru dalam keseimbangan global. Disamping itu, muncul kekuasaan dan kebutuhan yang lebih luas untuk sebuah tatanan nuklir yang baru di dunia internasional dalam menghadapi tatanan global. Non-proliferasi nuklir tampaknya sudah tidak lagi efektif dalam memenuhi tantangan yang dihadapi masyarakat internasional saat ini.

#### **1.6. Kerangka Teori**

Terkait erat dengan kasus yang diangkat dalam skripsi ini, maka untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap nuklir India digunakan teori, antara lain:

1. Aliansi
2. Strategi Keamanan
3. Kepentingan Nasional
4. Penangkalan Nuklir

### 1.6.1. Teori Aliansi

Aliansi merupakan suatu yang sifatnya sangat strategis. Dengan terbentuknya aliansi, suatu kawasan dapat lebih terjaga stabilitas, baik secara politik, ekonomi, dan keamanan. Sementara itu menurut Stephen Walt dalam bukunya yang berjudul *The Origin of Alliances* mengatakan bahwa:

*“An alliance is a formal or informal arrangement for security cooperation between two or more sovereign states.<sup>14</sup> Alliances form to balance threats, not simply power. Geography, offensive capability, and perceived intention contribute to the level of the threat. Second, ideology is not as strong a factor as is balancing in the formation of alliances. Indeed, some ideologies are divisive rather than likely to lead to strong alliances”.<sup>15</sup>*

Aliansi adalah bentuk kerjasama keamanan negara baik formal ataupun informal dengan melibatkan dua atau lebih negara yang berdaulat. Aliansi terbentuk untuk menyeimbangkan ancaman, bukan hanya kekuasaan. Geografi, kemampuan ofensif, dan niat yang dirasakan berkontribusi pada tingkat ancaman. Kedua, ideologi bukan sebagai faktor kuat seperti yang menyeimbangkan dalam pembentukan aliansi. Memang, beberapa ideologi sifatnya rapuh dan dapat terpecahbelah dibandingkan dengan kecenderungan membentuk aliansi yang kuat.

Kemudian Stephen Walt membagi Aliansi Internasional menjadi beberapa hipotesis. Aliansi internasional tersebut antara lain<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup> Stephen Walt, *The Origins of Alliances*, Ithaca: Cornell University Press, 1987, h.12.

<sup>15</sup>Walt, *Op.cit*, h.5.

<sup>16</sup> Walt, *Opcit*, h.32-49.

1. *Balancing in response to a threat*

Balancing terjadi ketika negara-negara bersekutu satu sama lain terhadap ancaman yang berlaku. Ada dua alasan utama mengapa negara melakukan balancing. Pertama, untuk menghentikan kekuatan sebuah hegemon sebelum memiliki keuntungan yang terlalu banyak dari kekuasaannya. Kedua, karena bergabung dengan pihak yang lemah memungkinkan suatu negara untuk memegang kekuasaan lainnya yang berjarak aliansi.

2. *Common ideology as a grounds for alliance formation*

Hipotesis ini didasarkan pada keyakinan bahwa bersekutu dengan negara-negara dengan keyakinan yang sama, negara dapat mempertahankan prinsip-prinsip politiknya. Negara yang berideologi sama, memiliki alasan yang kurang untuk takut satu sama lain.

3. *Foreign aid and alliance formation*

Keuntungan yang didapat jika bersekutu dengan negara yang memberikan bantuan luar negeri. Pertama, bantuan luar negeri dapat terjadi hanya di mana keselarasan politik yang sudah ada atau sudah dianggap dalam kepentingan suatu negara. Kedua, bantuan meningkatkan kemampuan penerima, yang berarti mungkin kurang tergantung pada donor dan lebih mampu menahan tekanan. Ketiga, dengan menyediakan lebih sebagai cara untuk



mencegah pembelotan, negara donor kehilangan pengaruh atas penerima mereka.

Stephen Walt juga menjelaskan sumber-sumber ancaman yang dibagi kedalam 4 (empat) bentuk sumber ancaman, antara lain: (i) Aggregate power; (ii) Geographic proximity; (iii) Offensive power; (iv) Aggressive intentions.<sup>17</sup>

- *Aggregat Power* (Perbedaan Kekuatan): Hal ini dapat dilihat dari total sumber daya suatu Negara (populasi, industry, kemampuan militer, kekuatan teknologi)
- *Geographic Proximity* (Kedekatan Geografis): Negara-negara juga akan beraliansi untuk merespon ancaman-ancaman dari Negara terdekat. Karena ancaman dari kekuatan terdekat jauh lebih berbahaya daripada Negara yang secara geografikal letaknya lebih jauh. Sebagai contoh adalah Inggris akan memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan angkatan laut Jerman dibandingkan pergerakan perlawanan di Brazil.
- *Offensive power* (Kekuatan Menyerang) : Negara dengan kekuatan menyerang yang besar akan cenderung terlihat seperti memprovokasi sebuah aliansi daripada Negara-negara yang mempunyai kekuatan militer yang lemah dan hanya mempunyai kemampuan untuk bertahan. Ancaman seperti ini akan membuat suatu Negara beraliansi untuk menyeimbangkannya. Contohnya: saat Inggris menganggap Kekuatan

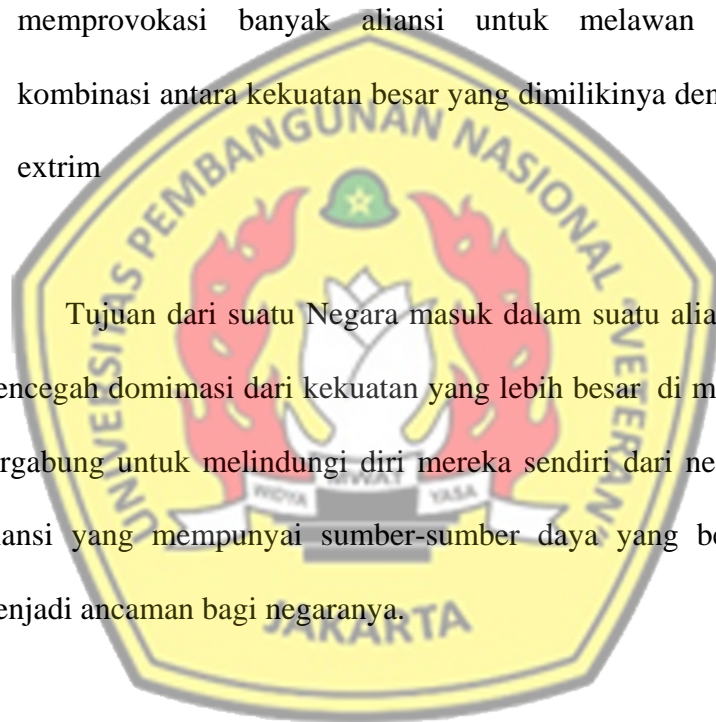
---

<sup>17</sup> Walt, *Op.cit*, h.22-26.

Laut Jerman sebagai suatu ancaman. Maka Inggris akan menggandakan kekuatan militernya ketika bergabung dengan Perancis dan Rusia.

- *Aggressive intentions* (Intensitas Penyerangan): Negara yang memunculkan keagresifitasan akan memprovokasi suatu Negara untuk melakukan aliansi. Seperti pada saat Nazi Jerman berkuasa. Nazi memprovokasi banyak aliansi untuk melawan dirinya karena kombinasi antara kekuatan besar yang dimilikinya dengan ambisi yang ekstrim

Tujuan dari suatu Negara masuk dalam suatu aliansi adalah untuk mencegah dominasi dari kekuatan yang lebih besar di mana Negara akan bergabung untuk melindungi diri mereka sendiri dari negara-negara atau aliansi yang mempunyai sumber-sumber daya yang besar yang dapat menjadi ancaman bagi negaranya.



### 1.6.2. Strategi Keamanan

Strategi keamanan merupakan upaya negara untuk mencapai keamanannya dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas sistem internasional.<sup>18</sup> Arti strategi itu sendiri secara umum adalah suatu persiapan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan senjata atau bahkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik.<sup>19</sup>

Dalam bentuknya yang klasik, strategi kerap dikaitkan dengan perang. Sun Tzu seorang penasihat kerajaan yang hidup di masa China kuno mengaitkan strategi sebagai seni para jenderal. Hal itu dapat dimaklumi karena konsep dasar strategi saat itu adalah ajang adu kecerdikan para jenderal untuk mencapai kemenangan, yang kebanyakan ditentukan di medan perang.<sup>20</sup> Carl Von Clausewitz, seorang ahli strategi Prusia yang hidup di era Napoleon mengatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Strategi digunakan dalam peperangan sebagai alat mencapai tujuan-tujuan politis.<sup>21</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, Michael Porter mengembangkan studi strategi ke medan bisnis. Melalui bukunya, "*What Is Strategy?*" Porter menjelaskan bahwa strategi adalah bagaimana menggunakan cara yang berbeda dengan rival untuk memenangkan sebuah kompetisi.

---

<sup>18</sup> Thomas R. Fedyszyn, *Strategy and Force planning, Implementing Strategy: The Diplomatic Tool*. Newport: Naval War College Press, 2004, h. 311.

<sup>19</sup> Terhemba Nom Ambe-Uva, *Strategic Studies in the 20th Century* (Nigeria: National Open University of Nigeria, 2008) hal. 3-5.

<sup>20</sup> Tzu, Sun, 1998. *The Art of War*. Hertfordshire: Worrddworth Classic of World Literature, pp. 10-53

<sup>21</sup> Clausewitz, Carl Von. 1984. "Strategy", in *On War*, edited and translated by M.Howard and P. Paret, Princeton: Princeton University Press, pp. 177-183

Dengan kata lain studi strategi mengalami perubahan dari masa ke masa.<sup>22</sup> Dari evolusi konsep strategi diatas, bisa dikatakan bahwasanya dalam bentuknya yang lebih luas, inti dari studi strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan lebih tinggi menghadapi perubahan dunia tidak menentu.

Suatu negara memerlukan strategi keamanan untuk meningkatkan kekuatan militernya.<sup>23</sup> Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan militernya, suatu negara menjalin aliansi dengan negara lain. Dalam hal ini Amerika Serikat memiliki strategi keamanan dalam mendukung pengembangan nuklir India yaitu dengan cara memberikan bantuan politik dan militer berupa pemberian bahan bakar uranium, transfer teknologi dan *technical support*. Dalam kasus Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap nuklir India, hal itu dikarenakan untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat yaitu untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Selatan. Dalam hal ini Amerika Serikat mengajak India beraliansi untuk menghadapi rivalnya yaitu China dan Pakistan. Dengan memberikan strategi berupa dukungan terhadap nuklir India, Amerika Serikat yakin akan dapat memenangkan 'kompetisi' melawan China dan Pakistan.

---

<sup>22</sup> Porter E. Michael. 1991. "Toward a Dynamic Theory of Strategy", *Strategic Management Journal*, Vol. 12, pp. 95-117

<sup>23</sup> Terhemba Nom Ambe-Uva, *Strategic Studies in the 20th Century* (Nigeria: National Open University of Nigeria, 2008) hal. 3-5.

### 1.6.3. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam teori kepentingan nasional menjelaskan bahwa kelangsungan hidup suatu negara adalah dimana negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain negara tersebut telah mencapai kepentingannya. Dengan tercapainya kepentingan nasional suatu negara maka negara tersebut akan berjalan dengan stabil dan baik, hal ini dapat dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain jika suatu negara telah memenuhi kepentingan nasionalnya maka negara tersebut akan bisa *survive*. Kepentingan nasional merupakan tujuan dasar dan faktor yang menentukan dalam memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Menurut Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.<sup>24</sup>

Pada dasarnya ada 2 fungsi dari *national interest*. Yang pertama adalah menentukan arah para pemimpin negara dalam politik luar negeri. Dan juga sebagai ukuran keberhasilan pemimpin negara menjalankan politik luar negerinya. Fungsi lain dari *national interest* adalah agar negara bisa tetap *survive* dan menjaga eksistensi negara. Dengan kepentingan nasional maka negara akan mempunyai sebuah *power*, mempunyai *bargaining position* terhadap negara lain. Sehingga dengan

---

<sup>24</sup> Daniel S. Papp, *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding, Second Editions* (New York: MacMillan Publishing Company, 1988), hal 29.

*power* yang dimiliki ini negara akan tetap terjaga eksistensinya dalam kancah politik internasional.<sup>25</sup>

Menjaga kepentingan nasionalnya merupakan strategi paling utama bagi AS dihadapan seluruh negara di dunia. Amerika Serikat saat ini menjadi satu-satunya negara super power berusaha untuk menguasai seluruh negara di dunia dengan menyebarkan pengaruhnya agar mereka tunduk dan patuh terhadap kebijakan AS yang dilakukannya untuk mencapai kepentingan nasional. Berdasarkan Komisi Kepentingan Nasional Amerika Serikat (*The Commission on America's National Interests*) setidaknya ada lima kepentingan nasional Amerika Serikat yang sangat penting, yaitu:<sup>26</sup>

1. Mencegah dan mengurangi ancaman senjata nuklir, biologi, dan kimia terhadap Amerika Serikat dan anggota militernya di luar negeri.
2. Menjaga kelangsungan aliansi dengan negara-negara sekutu dan kerjasama mereka dalam membentuk sistem internasional dimana mereka bisa bertahan.
3. Mencegah timbulnya negara yang tidak bersahabat (*hostile states*) dan negara gagal (*failed states*) yang berbatasan dengan AS.

---

<sup>25</sup> G. Roskin Michael. 1994. *National Interest: From Abstraction to Strategy*. Strategic Studies Institute.

<sup>26</sup> Document: *America's National Interests: The Commission on America's National Interests*.

4. Menjaga keberadaan dan stabilitas sistem global yang berkaitan dengan perdagangan, pasar uang, persediaan energi dan lingkungan.
5. Membangun kerjasama yang produktif dan konsisten dengan kepentingan nasional AS dengan negara-negara strategis seperti China dan Rusia.

#### 1.6.4. Teori Penangkalan Nuklir (*Nuclear Deterrence Theory*)

*Deterrence* yakni penangkalan kekuatan militer yang mampu menangkalkan musuh dari upayanya melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang besar apabila musuh tetap berupaya melakukan hal tersebut.<sup>27</sup> *Nuclear Deterrence* menurut Jonathan Knight mampu mencegah terjadinya perang.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa alasan mengapa *nuclear deterrence* dapat mencegah terjadinya perang. Pertama, kekuatan senjata nuklir mampu menciptakan kehancuran luar biasa secara langsung dan cepat tanpa harus melewati peperangan konvensional. Kedua, tidak ada satu pun negara pemilik senjata nuklir yang mampu selamat dari bahaya kehancuran senjata nuklir manakala senjata nuklir tersebut telah diluncurkan.

Senjata nuklir adalah salah satu alat pemusnah massal yang mendapatkan daya ledak (daya hancur) dari reaksi nuklir, baik reaksi fisi

---

<sup>27</sup> Robert J. Art, *To What Ends Military Power*, International Security, Vol. 4 (Spring 1980) pp.4-35

<sup>28</sup> Jonathan Knight, "Risks of War and Deterrence Logic", Canadian Journal of Political Science, Vol.6 No. 1 (Mar, 1973), hal. 22-36.

atau kombinasi dari fisi dan fusi. Senjata nuklir mempunyai kemampuan merusak dengan skala besar. Daya ledak senjata nuklir atau kepala nuklir mencapai 61 megaton atau sekitar 61.000.000 ton TNT.<sup>29</sup> Dengan daya ledak sebesar itu mampu menghancurkan setengah bumi ini.

Dari segi kredibilitas, senjata nuklir digunakan sebagai alat penangkal efektif jika kepemilikan kemampuan yang cukup untuk melakukan pembalasan yang diancamkan. Dan alat penangkal yang efektif harus mengancam dan membuat lawan tidak tertarik untuk melakukan tindakan agresif.<sup>30</sup> Sehingga senjata nuklir dapat digunakan sebagai kekuatan militer yang efektif dalam segi kekuatan atau *force* dengan melakukan *deterrence*. Dengan mencegah musuh menyerang atau meyakinkan musuh untuk tidak melakukan perlawanan. Kemampuan balasan sebuah negara berkaitan dengan kemampuan dalam bertahan atau *defensive*. Semakin besar kemampuan dalam bertahan sebuah negara, semakin enggan musuh untuk melakukan serangan, dengan demikian secara fisik mampu membuat musuh untuk berfikir keras atas tindakan untuk melakukan serangan.<sup>31</sup>

Bagi India sendiri, peningkatan kapabilitas senjata nuklir lebih disebabkan oleh adanya ancaman dari Pakistan serta aliansi yang dilakukannya dengan China. Peningkatan kapabilitas ini memfokuskan pada segi militer yang membutuhkan dukungan dari senjata konvensional

---

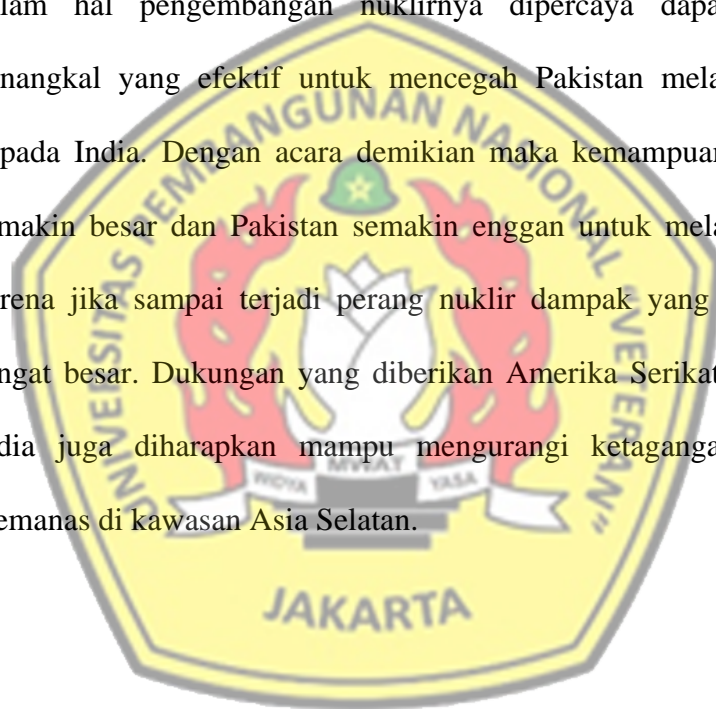
<sup>29</sup> K.J. Holsti, Kerangka untuk Analisis politik internasional, edisi terjemahan: M. Tahir Azhari, Jakarta, hal 34.

<sup>30</sup> Holsti, *Op.cit*, h39.

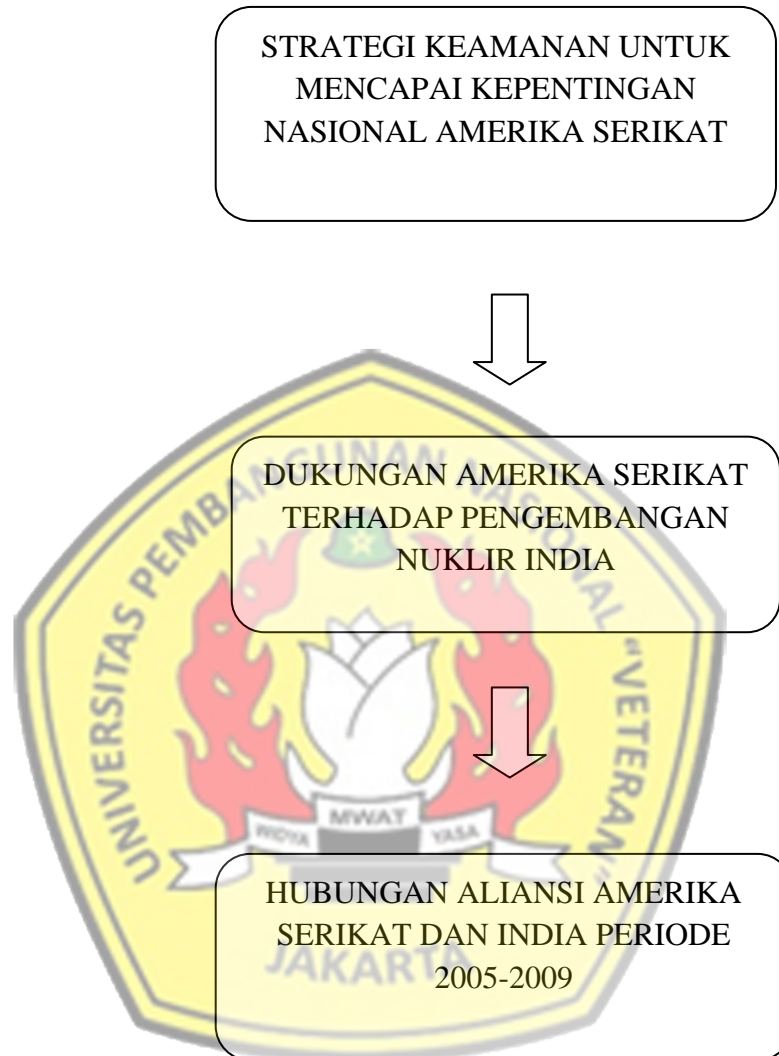
<sup>31</sup> Robert Powell, *Nuclear Deterrence Theory*, New York: Cambridge University Press, 1990, hal 8.



serta tentunya senjata nuklir yang memberikan efek *deterrence*. Dalam hal pemberian dukungan oleh Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir India, hal tersebut merupakan upaya penangkalan terhadap nuklir yang dimiliki Pakistan agar Pakistan tidak lagi bertindak agresif dengan melakukan serangkaian serangan ujicoba nuklir untuk menakut-nakuti India. India yang didukung oleh negara besar seperti Amerika Serikat dalam hal pengembangan nuklirnya dipercaya dapat menjadi alat penangkal yang efektif untuk mencegah Pakistan melakukan serangan kepada India. Dengan acara demikian maka kemampuan bertahan India semakin besar dan Pakistan semakin enggan untuk melakukan serangan karena jika sampai terjadi perang nuklir dampak yang dihasilkan akan sangat besar. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat terhadap nuklir India juga diharapkan mampu mengurangi ketegangan yang sedang memanas di kawasan Asia Selatan.



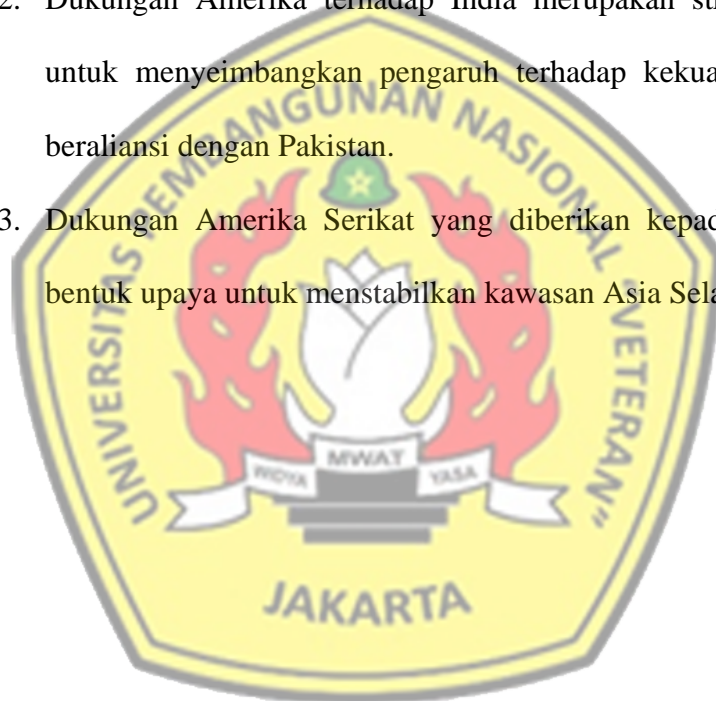
### 1.7. Alur Pemikiran



## 1.8. Asumsi

Asumsi yang diperoleh adalah:

1. Amerika Serikat mendukung India dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai sejauh hal itu dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan internasional, termasuk yang ditetapkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
2. Dukungan Amerika terhadap India merupakan strategi keamanan untuk menyeimbangkan pengaruh terhadap kekuatan China yang beraliansi dengan Pakistan.
3. Dukungan Amerika Serikat yang diberikan kepada India sebagai bentuk upaya untuk menstabilkan kawasan Asia Selatan.



## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

### **1.9.2 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama berupa dokumen resmi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis hanya mencari dan mengumpulkan seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan atau tulisan orang lain, dan lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan serta melalui media *online*.

### **1.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **1.9.4 Teknik Analisa Data**

Data yang didapat kemudian dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian.

## 1.10. **Sistematika Pembabakan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERKEMBANGAN STRATEGI PENANGKALAN NUKLIR INDIA**

Bab kedua akan membahas mengenai *Nuclear Non Proliferation Treaty* (NPT), program nuklir India, pengembangan senjata nuklir India, uji coba nuklir India dan respon Pakistan dan China serta peranan Amerika Serikat.

### **BAB III KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DAN STRATEGI KEAMANANNYA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN NUKLIR INDIA**

Bab ketiga akan membahas mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat dibidang keamanan, strategi keamanan Amerika Serikat dan aliansi Amerika Serikat dan India

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.